



Kepemimpinan Pemerintahan Herman Deru di Sumatera Selatan periode 2018 – 2023

Muhammad Quranul Kariem^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Email correspondence: mquranul@uigm.ac.id*

Abstract

This study aims to examine the governance leadership implemented by the government at the local level. The study employs a qualitative approach using a literature review method. The findings reveal that Herman Deru's governance leadership has successfully impacted both the community and the government through the implementation of well-regulated policies. However, the policies implemented lack strong objectives. This study has implications for the refinement of governance leadership theory.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah di tingkat lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa kepemimpinan pemerintahan herman deru berhasil memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan berbasis regulasi yang baik. Namun kebijakan yang dilaksanakan belum memiliki tujuan yang kuat. Studi ini berimplikasi pada penyempurnaan teori kepemimpinan pemerintahan.

Keywords :

Government
Leadership, Policy,
Regulations

Kata Kunci :

Kepemimpinan
Pemerintahan,
Kebijakan,
Regulasi

PENDAHULUAN

Studi terkait dengan kepemimpinan pemerintahan telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh (Vu, 2025) yang berpendapat bahwa kepemimpinan pemerintahan dan kolaborasi sektor swasta merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan publik di Vietnam. Kepemimpinan pemerintahan memiliki peran yang strategis, studi dari (Wu et al., 2025) bahwa di China kepemimpinan pemerintahan memiliki andil untuk mendorong transformasi digital dalam pemerintahan. Temuan tersebut didukung juga oleh studi dari (Rong et al., 2024) yang berpendapat bahwa kepemimpinan pemerintahan di China yang berinvestasi pada sektor Pendidikan memberikan dampak positif dalam berbagai hal.

Dalam konteks Indonesia juga dilakukan banyak studi terkait kepemimpinan pemerintahan, (Kurniawan, 2022) berpendapat bahwa kualitas kepemimpinan pemerintahan memiliki andil besar untuk menentukan keberhasilan penanganan situasi krisis, dalam hal ini adalah penanganan kasus covid-19 melalui pemberian informasi dan bantuan sosial kepada masyarakat, serta mengidentifikasi peta sebaran kasus covid-19. Studi ini mampu menjelaskan dampak dari kepemimpinan pemerintahan, namun masih terbatas dalam konteks situasi krisis pada covid-19, bukan dalam konteks pelaksanaan kebijakan dalam situasi non-krisis. Studi lain yang dilakukan oleh (Muhtar et al., 2022a), bahwa kepemimpinan pemerintahan di Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terkait dengan warisan adat dan juga konflik kepentingan dalam berbagai aspek, serta masalah eksistensi pemerintahan adat. Studi ini mendeksripsikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kepemimpinan pemerintahan, namun masih dalam konteks budaya tertentu.

Studi kepemimpinan pemerintahan selanjutnya, dalam lingkup kepemimpinan pada tingkat kelurahan, dimana (Mustanir et al., 2019) dan (Ratna & Dema, 2020) berpendapat bahwa kepemimpinan lurah memiliki pengaruh yang cukup terhadap pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sindenreng Rappang. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk membuktikan keterkaitan kepemimpinan pemerintahan dengan indikator lainnya. Temuan ini juga didukung studi yang dilakukan oleh (Marlina et al., 2021) yang berpendapat bahwa kepemimpinan kepala desa yang baik dalam memberikan pendapat dan mengarahkan perangkat desa akan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi juga perlu dimiliki oleh perangkat desa untuk mewujudkan dana desa yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan di tingkat desa, kepala desa merupakan pemimpin formal, namun studi yang dilakukan oleh (Mayrudin et al., 2020) berpendapat bahwa kepala desa di salah satu desa adat di

Kabupaten Lebak Banten hanya menjadi sub-ordinat dari kepala adat yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Kepala adat merupakan pemimpin yang sebenarnya yang memiliki hegemoni kekuasaan dan juga sebagai aktor bayangan dari kepala desa. Studi ini cukup menarik karena mampu menjelaskan dua sisi kepemimpinan dari sudut pandang formal dan informal.

Sementara itu, pada tingkat daerah (Widiyaningrum, 2021) berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kepala daerah perlu memiliki strategi untuk mampu mendengarkan, merasakan, menanggapi, serta mewujudkan keinginan, aspirasi, dan tuntutan dari masyarakat. Studi terkait dengan kepemimpinan kepala daerah dilakukan oleh (Prastio et al., 2021) yang menemukan bahwa Walikota Tangerang Selatan mengarahkan para birokratnya untuk dapat mengutamakan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Selain itu, kebijakan kongkrit yang dilakukan terkait dengan hal tersebut adalah pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dari walikota. Studi ini cukup menunjukkan secara jelas penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin pemerintahan. Studi yang dilakukan di Kota Depok oleh (Rahayu & Marsha, 2023) yang berpendapat bahwa kepemimpinan pemerintahan harus mampu mengarahkan dan memadukan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Rodzi, 2024) terkait kepemimpinan pemerintahan di tingkat daerah, lemahnya etika kepala daerah yang berpengaruh pada penyalahgunaan kekuasaan, terjadi karena biaya politik yang tinggi. Dalam kepemimpinan pemerintahan, etika dalam kekuasaan menjadi sangat penting, hal ini disampaikan oleh (Jeddawi et al., 2023), dimana penggunaan kekuasaan harus dilaksanakan secara bijaksana, tidak arogan, sesuai budaya dan perilaku organisasi yang adaptif berbasis nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Pada era modern saat ini, tidak hanya etika yang menjadi elemen penting dalam kepemimpinan pemerintahan, menurut pendapat dari (Sartika, 2023) inovasi dan transformasi harus menjadi karakter yang melengkapinya.

Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan terkait dengan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, bahwa belum terdapat yang membahas konteks kepemimpinan pemerintahan di daerah menggunakan pendekatan teoritis secara mendalam, hanya studi dari (Muhtar et al., 2022b) yang berhasil menjelaskan kepemimpinan pemerintahan melalui pendekatan teori tentang *shadow state*, namun baru sebatas pada pemerintahan di tingkat desa. Studi ini akan membahas kepemimpinan pemerintahan dari Herman Deru selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018 - 2023. Kepemimpinan pemerintahan Herman Deru dipilih menjadi objek studi karena memiliki kewenangan yang bersinggungan

langsung dengan dimensi yang cukup kompleks pada wilayah Sumatera Selatan. Sebelum terpilih menjadi Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, ia sempat mengalami kekalahan melawan *petahana* Alex Noerdin pada Pilkada tahun 2013. Herman Deru merupakan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur selama dua periode (2005-2015), terakhir ia kembali terpilih menjadi Gubernur pada Pilkada Serentak tahun 2024.

Herman Deru Bersama Mawardi Yahya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2018 - 2023 oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2018 di Istana Negara Jakarta (Kemensetneg, 2018). Studi ini akan membahas peraturan daerah (perda) provinsi Sumatera Selatan yang dihasilkan pada masa kepemimpinan pemerintahan Herman Deru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Perda yang dibahas adalah salah satu perda setiap tahunnya, yang berdampak bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2018, tidak terdapat perda yang ditandatangani oleh Herman Deru selaku gubernur. Memasuki tahun 2019, Herman Deru Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan 8 (delapan) Perda, salah satu yang menarik adalah Perda nomor 2 tahun 2019 tentang cadangan pangan pemerintah provinsi. Selanjutnya pada tahun 2020, menghasilkan 13 (tiga belas) Perda, salah satu yang berdampak bagi masyarakat adalah Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Sumatera Selatan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, pada tahun 2021 juga dihasilkan 13 Perda, dan yang mendapatkan atensi dari masyarakat adalah Perda nomor 3 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pada tahun 2022, terdapat 6 perda, salah satunya adalah terkait dengan retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Pada tahun 2023, terdapat 5 Perda yang dihasilkan, salah satunya adalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

1.1. Tabel Jumlah Perda pada masa Pemerintahan Herman Deru

Tahun	Jumlah Perda
2018	-
2019	8
2020	13
2021	13
2022	6
2023	5

Sumber : <https://jdih.sumselprov.go.id/>

Berbagai kebijakan Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif

teoritis. Selama menjadi kepala daerah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, total perda yang dihasilkan adalah 45 perda. Teori yang akan digunakan adalah teori tentang kepemimpinan pemerintahan dari (Koehler, 1996) yang berpendapat bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah proses mempengaruhi orang lain dan mengarahkan jalannya kebijakan melalui pemberlakuan peraturan perundang – undangan. Indikator dari teori ini adalah proses mempengaruhi *stakeholders* (birokrasi pemerintah, sector swasta, dan masyarakat), indikator selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan melalui regulasi (perda) yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dari perda yang dikeluarkan setiap tahun oleh Herman Deru dan DPRD, cukup menarik untuk mengetahui dampak yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Zed, 2008). Data – data dikumpulkan dan dipilih dari pernyataan publik yang disampaikan Herman Deru dari berbagai media online yang kredibel, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan kerangka teoritis yang telah ditetapkan. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan dari Milles & Huberman (Herdiansyah, 2010) dengan pengelompokan data, interpretasi data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Herman Deru dan Mawardi Yahya berhasil memenangkan Pilkada Sumatera Selatan tahun 2018 dengan meraih 1.394.438 suara dari total 3.877.626 suara sah di 17 Kabupaten/Kota (Putra & Galih, 2018). Herman Deru berhasil mengalahkan Dodi Alex Reza (Bupati Musi Banyuasin) yang merupakan anak dari Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan 2008-2018). Pasangan tersebut diusung oleh 3 (tiga) partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN) (Supardi, 2018). Kondisi tersebut membuat dukungan politik Herman Deru sebagai Gubernur sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar 19% atau 14 kursi dari 75 kursi DPRD Provinsi Sumsel (Kariem & Iqbal, 2023). Visi besar yang diusung adalah *tagline* “Sumsel Maju untuk Semua”, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023.

Pembahasan pertama terkait dengan kebijakan pemerintah Herman Deru terkait dengan cadangan pangan. Kebijakan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan. Herman Deru menargetkan untuk dapat meningkatkan produksi beras dengan menaikkan peringkat ke tiga besar, pada tahun 2020 Sumsel berada pada peringkat ke lima (Rosana & Suyanto, 2020). Selain itu, Gubernur Sumsel

juga memiliki Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk peternakan dan tanaman pangan yang bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, dengan memberikan bantuan benih. Program ini dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, dengan target 81.000 rumah tangga miskin di 17 Kabupaten/Kota, dengan realisasi mencapai 2.031 rumah tangga miskin pada November 2022 yang lalu (Rosana & Purnomo, 2022). Angka kemiskinan di Sumatera Selatan memang mengalami penurunan sejak program GSMP diluncurkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada September 2021 berada pada angka 12,79% dan menjadi 11,95% pada September 2022. Namun kebijakan tersebut dianggap oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumsel belum memiliki indikator yang jelas untuk diukur tingkat keberhasilannya (Jati & Herlambang, 2023).

Kepemimpinan Pemerintahan Herman Deru apabila diukur menggunakan kebijakan ini, bahwa kebijakan cadangan pangan secara regulasi sudah sangat jelas, dan hal tersebut akhirnya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah gubernur untuk bergerak melaksanakan program GSMP yang juga dilakukan oleh masyarakat, namun pencapaian tujuan dari kebijakan ini dianggap belum cukup jelas untuk dapat diklaim sebagai keberhasilan.

Selanjutnya adalah terkait dengan regulasi mengenai pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Sumatera Selatan juga menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Herman Deru. Gubernur berpendapat bahwa wilayahnya selalu dikecam berbagai pihak karena dianggap pengekspor asap yang diakibatkan lahan tidak dapat dikelola dengan baik (Gewati, 2023), ia juga menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan pada umumnya tidak pernah terjadi pada lahan yang dikelola, namun terjadi di lahan yang terbengkalai (Sh & Gewati, 2023). Herman Deru meminta tidak hanya melakukan kegiatan penanaman semata dalam restorasi hutan, dan harus didukung dengan upaya untuk pemeliharaan dengan pemasangan pagar kawat berduri (Wulandari, 2019). Kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen dari kepala daerah dalam menyikapi terkait dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung agar dapat menjadi lebih baik.

Herman Deru juga mendukung peran dari pemerintah pusat yang melakukan pemetaan hutan yang dikelola masyarakat atau *fresh land* (tanah diluar Kawasan hutan) yang diharapkan berdampak pada berkurangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) (Rosana & Situmorang, 2021). Selain itu, ia juga mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan fasilitasi dan bantuan kepada kelompok perhutanan sosial melalui surat edaran gubernur (Muntaha, 2023). Kebijakan tersebut diakui belum optimal, namun gubernur terus mendorong dan mengingatkan seluruh *stakeholders* terutama pada sektor pemerintahan.

Dalam konteks lain, Gubernur juga berusaha menyelesaikan konflik masyarakat terkait dengan hutan produksi, salah satunya adalah di Kabupaten Musi Rawas, ia menekankan agar masyarakat dapat mendapatkan lahan garapan. Langkah tersebut juga didorong oleh Dinas Kehutanan yang memberikan alternatif rekomendasi yaitu skema tanah objek reforma agrarian (TORA) (Inge, 2021). Namun, regulasi yang baru berjalan 2 (dua) tahun terkait dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, sepakat dicabut oleh Gubernur Herman Deru dan DPRD Sumsel, melalui Perda Sumsel Nomor 1 Tahun 2022, karena kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan hal tersebut dianggap cukup, tanpa harus diturunkan dalam kebijakan tingkat pemerintah daerah.

Kepemimpinan pemerintahan Herman Deru dalam hal ini memang telah memiliki regulasi, namun kompleksitas permasalahan yang diselesaikan terkait dengan hutan dan lahan menjadi faktor lain yang membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tidak mudah untuk mencapai tujuan. Kebijakan gubernur melalui surat edaran menjadi kerangka kebijakan yang legal, namun hal itu belum cukup untuk menggerakkan *stakeholders*. Selain itu, pengaruh pemerintah pusat juga cukup penting untuk mengukur pelaksanaan kebijakan melalui regulasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD Sumsel.

Kebijakan selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas penyelenggaraan pesantren. Dalam perumusan kebijakan tersebut, Gubernur berpendapat bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pesantren selama ini hanya dipayungi oleh peraturan menteri dalam negeri (permendagri) terkait dengan bantuan hibah, ia juga menyatakan bahwa kedepan akan memberikan bantuan yang lebih proporsional karena aturan yang sudah jelas (indopolitika, 2021). Setelah perda disepakati, Regulasi tersebut diturunkan menjadi Pergub Sumsel Nomor 27 Tahun 2022, yang memberikan ruang pondok pesantren untuk diberikan bantuan hibah berupa keuangan, pemberian barang dan atau jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya di Sumsel.

Sebelum regulasi turunan tersebut ditetapkan, Gubernur menyatakan bahwa ia ingin memberikan dana bantuan sebesar Rp. 58.000 per santri/satriwati setiap bulan kepada seluruh pondok pesantren yang memiliki jenjang pendidikan pada tingkat SMA/MA di Sumsel, dengan meminta pihak pesantren memperbaiki urusan administrasinya masing-masing (Arjuna, 2021). Herman Deru menyatakan bahwa ia bangga dengan banyaknya pesantren yang berdiri di Sumatera Selatan (Sumsel) dan berharap hal itu dapat berdampak menjadikan daerahnya sebagai daerah yang religus (Wahyudi, 2022). Pada kesempatan lain, pada tahun 2022 yang lalu di Kabupaten Muara Enim Sumsel, Gubernur memberikan bantuan berupa kendaraan operasional berupa mobil dan ratusan sak semen untuk sebuah pondok pesantren (rri.co.id, 2022). Sementara itu pada tahun 2023, Gubernur Herman Deru memberikan

bantuan keuangan sebesar Rp. 15 Juta sampai dengan Rp. 20 Juta kepada pondok – pondok pesantren di Kota Palembang (Rian, 2023). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah disepakati bersama DPRD Sumsel secara kelembagaan, dengan dipanyungi pergub yang telah ditetapkan sebelumnya, berkomitmen memberikan bantuan hibah operasional kepada pondok pesantren sebesar Rp. 8,5 Milyar, yang dianggarkan dari APBD tahun 2024, besaran anggaran tersebut akan terus ditingkatkan (Oskandar & Praja, 2023).

Kepemimpinan pemerintahan herman deru dalam kebijakan fasilitasi pesantren dilakukan melalui kerangka regulasi yang sistematis, mulai dari undang – undang dari tingkat pemerintah pusat, perda, sampai dengan pergub. Namun, dari berbagai pernyataan publik dan langkah yang diambil terkait dengan kebijakan ini, belum terdapat visi besar yang cukup jelas dan terukur. Seharusnya, gubernur memiliki *roadmap* jangka panjang untuk mencapai indikator pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan di pondok pesantren untuk menghindari nuansa politis dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Kebijakan selanjutnya adalah terkait dengan retribusi penggunaan tenaga kerja asing, kebijakan ini dalam proses perumusannya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan daerah namun tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja daerah (wartareformasi.com, 2022). Gubernur Sumsel melalui Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing memang menjadi suatu dilema bagi tenaga kerja lokal, namun sulit untuk dihindari. Ia berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dari perizinan hingga pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing (sriwijayaupdate.com, 2022).

Data yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Kantor Wilayah Sumsel, tercatat terdapat 1.500 tenaga kerja asing yang bekerja di Sumsel, sekitar 85% berasal dari negara China (C. S. B. Budi, 2023). Banyaknya tenaga kerja asing tersebut diharapkan memang dapat diatur dan diawasi melalui regulasi yang telah disepakati oleh Gubernur dan DPRD Sumsel. Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* lainnya membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), pada tahun 2023 terdapat 10 warga negara asing (WNA) pelanggar aturan yang telah ditindak (Kemenkum Sumsel, 2024).

Namun, dinamika yang terjadi bahwa kelompok masyarakat sipil juga sempat menyampaikan protes terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang cukup banyak di salah satu perusahaan multi nasional di kota Palembang (monpera.id, 2024). Dalam sudut pandang tertentu, yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikatakan adalah untuk melindungi tenaga kerja lokal dan juga mendapatkan tambahan dari sektor penerimaan daerah. Namun dalam sudut pandang lain, kebijakan tersebut terkesan menyikapi masalah tenaga kerja asing secara pragmatis, karena diukur melalui retribusi yang diberikan, tanpa memikirkan dampak lainnya. Kepemimpinan

pemerintahan gubernur dalam kebijakan ini memang memiliki suatu tujuan, namun regulasi yang melibatkan banyak pihak, terutama dari pemerintah pusat dalam proses implementasinya, menjadikan pelaksanaannya seringkali berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Kebijakan terakhir adalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, kebijakan ini memang tidak secara langsung disepakati pada masa pemerintahan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel, namun disepakati pada masa pemerintahan Pejabat (Pj) Gubernur. Kondisi pendapatan daerah sumsel dari sektor pajak pada tahun 2020 sebesar Rp. 3,7 Triliun (Adi, 2020), selanjutnya pada tahun 2021 pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 3,52 Triliun (indopolitika.com, 2022), dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi pendapatan daerah menjadi Rp. 4,53 Triliun karena berbagai upaya pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (Erfizal & Tiarhendi, 2023). Dalam tiga tahun terakhir penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tercermin dalam pendapatan asli daerah sumsel memang mengalami fluktuasi karena situasi pandemi covid-19, pembaharuan regulasi yang dilakukan pada akhir tahun 2023 terkait pajak dan retribusi diharapkan memberikan dampak yang lebih baik pada pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2024, Sumsel mendapatkan penerimaan dari sektor pajak daerah sebesar Rp. 4,74 Triliun, hal tersebut diklaim akibat sinergitas yang berhasil dilaksanakan antar lembaga pemerintahan dan masyarakat (Baiduri & Abdullah, 2025). Berdasarkan besaran pendapatan asli daerah selama beberapa tahun terakhir, tahun 2024 menjadi yang paling tinggi. Kepemimpinan pemerintahan Herman Deru dalam konteks ini memang secara tidak langsung turut berperan dalam perumusan regulasi dan peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun terakhir, namun berdasarkan data diatas bahwa ia berhasil menaikkan penerimaan pajak yang turun drastis pada tahun 2022.

Masa pemerintahan Herman Deru sebagai Gubernur periode 2018 - 2023 berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023, ia digantikan oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni (2023-2024) dan dilanjutkan oleh Elen Setiadi (2024-2025) yang ditunjuk sementara waktu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Herman Deru menyatakan bahwa secara teknokratis visi dan misinya selama lima tahun telah tercapai bahkan terlampaui, namun ia memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik apabila kembali dipercaya oleh masyarakat (C. Budi, 2023). Herman Deru terpilih kembali menjadi Gubernur Sumatera Selatan untuk periode keduanya tahun 2025 - 2030, ia didampingi oleh Cik Ujang sebagai Wakil Gubernur. Herman Deru berhasil mengalahkan Mawardi Yahya (Wagub Sumsel 2018-2023) dan Eddy Santana (Anggota DPR 2019-2024) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

KESIMPULAN

Kepemimpinan pemerintahan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel dalam 4 (empat) kebijakan yang diambil selama masa jabatannya periode tahun 2018-2023, sesungguhnya masing - masing secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak (*impact*) bagi masyarakat dan juga pemerintahan. Kebijakan tersebut dijalankan dengan kerangka hukum yang baik dengan memperhatikan aspek regulasi yang berada di atasnya. Namun, setiap kebijakan yang dijalankan belum benar-benar memiliki pondasi tujuan yang kuat, sehingga berpotensi tidak akan menjadi kebijakan jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam perspektif teoritis, kepemimpinan pemerintahan dalam konteks kasus ini memang berhasil mempengaruhi orang - orang untuk menjalankan kebijakan melalui regulasi, tetapi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhinya, yaitu adalah terkait dengan ada atau tidaknya tujuan yang kuat dari sebuah kebijakan, serta hierarki pemimpin pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Studi ini memiliki batasan yaitu hanya 1 (satu) kebijakan yang dipilih dalam setiap tahun dari banyak kebijakan yang diambil melalui peraturan daerah (perda), selain itu kelemahan studi ini adalah dengan hanya menggunakan data sekunder dari pernyataan publik pemimpin pemerintah yang dimuat dari media online. Rekomendasi studi selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari pengambil kebijakan, serta memperluas jumlah kebijakan yang dikaji setiap tahun.

REFERENCES

- Adi, R. (2020, December 30). *Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Daerah di Sumsel Over Target*. Gatra. <https://www.gatra.com/news-499724-ekonomi-akhir-tahun-penerimaan-pajak-daerah-di-sumsel-over-target.html>
- Arjuna. (2021, November 24). *Peduli Pesantren, Herman Deru Canangkan BOS untuk Ponpes di Sumsel | Indopolitika.com*. Indopolitika.Com. <https://indopolitika.com/peduli-pesantren-herman-deru-canangkan-bos-untuk-ponpes-di-sumsel/#!>
- Baiduri, A. R., & Abdullah, S. (2025, January 2). *Sepanjang 2024, penerimaan pajak daerah Sumsel capai Rp4,74 triliun*. Antara. <https://sumsel.antaranews.com/berita/768570/sepanjang-2024-penerimaan-pajak-daerah-sumsel-capai-rp474-triliun>
- Budi, C. (2023, September 29). *Masa Jabatan Selesai, Herman Deru: Insya Allah Bisa Duduk Lagi*. Detik. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6957348/masa-jabatan-selesai-herman-deru-insya-allah-bisa-duduk-lagi>
- Budi, C. S. B. (2023, July 28). *1.500 WNA Bekerja di Sumsel, 85 Persen dari China*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6846530/1-500-wna-bekerja-di-sumsel-85-persen-dari-china>
-

- Erfizal, R., & Tiarhendi, D. (2023, December 30). *Realisasi Pajak Sumsel 2023 Lewati Target Berkat Pemutihan*. IDN TIMES SUMSEL. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/realisasi-pajak-sumsel-2023-lewati-target-berkat-pemutihan?page=all>
- Gewati, M. (2023). *Buka Raker HMPS dan KPS, Gubernur Herman Deru Ingin Hutan Dikelola dengan Baik Agar Produktif*. KOMPAS.Com. https://regional.kompas.com/read/2023/06/19/20100471/buka-raker-hmps-dan-kps-gubernur-herman-deru-ingin-hutan-dikelola-dengan?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu*. Salemba Humanika.
- indopolitika.com, admin. (2022, January 4). *Wow! Realisasi PAD Sumsel di 2021 Over Target, Kepala Bapenda: Tahun 2022 Kembali Ditingkatkan* | Indopolitika.com. Indopolitika.Com. <https://indopolitika.com/wow-realisasi-pad-sumsel-di-2021-over-target-kepala-bapenda-tahun-2022-kembali-ditingkatkan/>
- indopolitika, admin. (2021, February 8). *Herman Deru Apresiasi Disahkannya Raperda Pesantren dan Arsitek Bangunan Ornamen Jati Diri Budaya di Sumsel* | Indopolitika.com. Indopolitika.Com. <https://indopolitika.com/herman-deru-apresiasi-disahkannya-raperda-pesantren-dan-arsitek-bangunan-ornamen-jati-diri-budaya-di-sumsel/>
- Inge, N. (2021). *Para Perempuan Cawang Gumilir, Tergusur dan Bertahan di Tengah Ketidakpastian*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/regional/read/4609156/para-perempuan-cawang-gumilir-tergusur-dan-bertahan-di-tengah-ketidakpastian-3?page=3>
- Jati, R. P., & Herlambang, C. H. (2023). *Program Kemandirian Pangan di Sumsel Dinilai Belum Memiliki Indikator Jelas*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/01/program-kemandirian-pangan-di-sumsel-dinilai-belum-memiliki-indikator-jelas>
- Jeddawi, M., Bakri, R., & Husain, M. F. (2023). *Kepemimpinan Pemerintahan Legalistik dan Humanistik*. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 85–96. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3879>
- Kariem, M. Q., & Iqbal, M. (2023). *Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806>
- Kemenkum Sumsel, admin. (2024, July 5). *Kemenkumham Sumsel Perketat Pengawasan TKA melalui Tim PORA*. Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-sumsel-perketat-pengawasan-tka-melalui-tim-pora>
- Kemensetneg, H. (2018). *Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel serta Kaltim*. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_lantik_gubernur_dan_wakil_gubernur_sumsel_serta_kaltim
- Koehler, J. W. (1996). *Transformational Leadership in Government*. In *Transformational Leadership in Government* (1st Editio). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b15726>
-

- Kurniawan, I. (2022). Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Diantara Krisis Pandemi Covid-19 Dan Digital Disruption. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(2), 29–40. [https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8\(2\).9776](https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(2).9776)
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- monpera.id, admin. (2024, December 25). K- MAKI Sumsel Protes Keras Keberadaan 300 Tenaga Kerja Asal China di PT Pusri – monperaid. Media Pemberitaan Rakyat. <https://monpera.id/k-maki-sumsel-protas-keras-keberadaan-300-tenaga-kerja-asal-china-di-pt-pusri/>
- Muhtar, M., Sardini, N. H., Fitriyah, F., & Tuanaya, W. (2022a). Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220>
- Muhtar, M., Sardini, N. H., Fitriyah, F., & Tuanaya, W. (2022b). PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220>
- Muntaha, S. (2023). *Ingatkan OPD, Gubernur Herman Deru Komitmen Kembangkan Perhutanan Sosial di Sumsel*. INews. <https://palembang.inews.id/read/310222/ingatkan-opd-gubernur-herman-deru-komitmen-kembangkan-perhutanan-sosial-di-sumsel>
- Mustanir, A., Samad, Z., Jabbar, A., Ibrahim, M., & Juniati, J. (2019). Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 99–118. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.185>
- Oskandar, D., & Praja, Y. I. (2023, September 23). 2024, Ponpes di Sumsel Kebagian Dana Hibah Rp8,5 Miliar . RMOLSUMSEL. <https://www.rmolsumsel.id/2024-ponpes-di-sumsel-kebagian-dana-hibah-rp85-miliar>
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.261>
- Putra, A. Y., & Galih, B. (2018). *Rekapitulasi KPU, Herman Deru- Mawardi Yahya Menangi Pilkada Sumsel*. <https://regional.kompas.com/read/2018/07/08/21231241/rekapitulasi-kpu-herman-deru-mawardi-yahya-menangi-pilkada-sumsel>
-

- Rahayu, N. S., & Marsha, A. (2023). KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN : PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DINAMIS (SUATU TINJAUAN KRITIS DAN ANALITIS) DI PEMERINTAH KOTA DEPOK. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(04), 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v12i4.3495>
- Ratna, R., & Dema, H. (2020). Kepemimpinan Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 112–131. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i2.243>
- Rian. (2023, February 2). *Pimpinan Ponpes Nurul Qomar Akui Perhatian Herman Deru pada Kemajuan Ponpes Sangat Tinggi*. Sumseldaily.Co.Id. <https://sumseldaily.co.id/pimpinan-ponpes-nurul-qomar-akui-perhatian-herman-deru-pada-kemajuan-ponpes-sangat-tinggi/>
- Rodzi, M. F. (2024). ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i1.1782>
- Rong, L., Deng, F., Zhong, Z., & Spours, K. (2024). Impact Analysis of Chinese Government Leadership in the Construction of a Public Service System of Preschool Education. *Education and Urban Society*, 56(7), 881–905. <https://doi.org/10.1177/00131245241226671>
- Rosana, D., & Purnomo, S. H. (2022). *Gotong royong mendorong kemandirian pangan Sumsel*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3203953/gotong-royong-mendorong-kemandirian-pangan-sumsel>
- Rosana, D., & Situmorang, B. (2021). *Sumsel jadi proyek percontohan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/2168906/sumsel-jadi-proyek-percontohan-peta-tematik-pertanahan-dan-ruang>
- Rosana, D., & Suyanto, B. (2020). *Sumatera Selatan target tiga besar penghasil beras nasional*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/1573944/sumatera-selatan-target-tiga-besar-penghasil-beras-nasional>
- rri.co.id, admin. (2022, July 28). *Herman Deru Bantu Wujudkan Pembangunan Masjid di Ponpes Al Jailaniyah Muara Enim*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/40400/herman-deru-bantu-wujudkan-pembangunan-masjid-di-ponpes-al-jailaniyah-muara-enim>
- Sartika, I. (2023). Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Transformasi Digital di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 222–236. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3830>
- Sh, I., & Gewati, M. (2023, September 13). *Pemadaman Karhutla di Sumsel Sulit karena Akses, Herman Deru dan BNPB Siapkan Strategi*. KOMPAS.Com. <https://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasional2025/read/2023/09/13/10233781/pemadaman-karhutla-di-sumsel-sulit-karena-akses-herman-deru-dan-bnpb-siapkan?page=all#page2>
-

- sriwijayaupdate.com, admin. (2022, February 25). *Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya Menyampaikan Tanggapan dan Jawaban Gubernur Sumsel atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD - SriwijayaUpdate.com*. Sriwijayaupdate.Com. <https://www.sriwijayaupdate.com/nasional/185910617/wagub-sumsel-h-mawardi-yahya-menyampaikan-tanggapan-dan-jawaban-gubernur-sumsel-atas-pandangan-umum-fraksifraksi-dprd>
- Supardi, A. (2018). *Tiga Partai Usung Herman Deru-Mawardi Yahya di Pilkada Sumsel*. <https://www.tempo.co/politik/tiga-partai-usung-herman-deru-mawardi-yahya-di-pilkada-sumsel-1001350>
- Vu, K. (2025). Electronic toll collection (ETC) on highways: Global trends, Vietnam's experience, and policy lessons. *Telecommunications Policy*, 49(1), 102892. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102892>
- Wahyudi, I. (2022, March 30). *Perbanyak Ponpes, Sumsel Akan Jadi Provinsi Religius – Sumsel Terkini*. Sumselterkini.Co.Id. <https://sumselterkini.co.id/pemprov-sumsel/perbanyak-ponpes-sumsel-akan-jadi-provinsi-religius/>
- wartareformasi.com, redaksi. (2022, March 18). *Gelar Paripurna, DPRD dan Pemprov Sumsel Sepakat Bahas Raperda RPTKA*. Wartareformasi.Com. <https://www.wartareformasi.com/2022/03/18/gelar-paripurna-dprd-dan-pemprov-sumsel-sepakat-bahas-raperda-rptka/>
- Widiyaningrum, W. Y. (2021). KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1 SE-Articles). <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/368>
- Wu, Y., Huang, R., & Li, B. (2025). Where has the time gone? A configurational analysis of the utilization level of China's municipal open government data (OGD) portals to reclaim "time." *The Electronic Library*. <https://doi.org/10.1108/EL-06-2024-0181>
- Wulandari, D. (2019). *Sumsel Dukung Restorasi Hutan di Bumi Sriwijaya*. Bisnis.Com. <https://sumatra.bisnis.com/read/20190125/533/882499/sumsel-dukung-restorasi-hutan-di-bumi-sriwijaya>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
-